



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 2207-2216

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Keterkaitan Ekonomi Publik terhadap Pendapatan Nasional dan Strategi Pengendalian Inflasi Indonesia

Yolanda Fardianti, Hendra Riofita

Program Studi Pendidikan ekonomi, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau

[fardiantiyolanda@gmail.com](mailto:fardiantiyolanda@gmail.com), [hendrariofita@yahoo.com](mailto:hendrariofita@yahoo.com)

### Abstrak

*Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional serta meneliti dampak inflasi dan strategi pengendaliannya di Indonesia. Studi ini menerapkan metode kualitatif melalui penelitian pustaka. Informasi diperoleh dari berbagai sumber akademis seperti jurnal, buku referensi, artikel penelitian, dan publikasi resmi yang berhubungan dengan ekonomi publik, PDB, inflasi, serta kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui pengumpulan, pengkajian, perbandingan, dan sintesis berbagai teori serta hasil penelitian yang relevan dengan topik. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ekonomi publik berperan krusial dalam menaikkan pendapatan nasional melalui pengaturan fiskal, kebijakan moneter, dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang efisien. Kebijakan pemerintah yang berupa pengeluaran negara, perpajakan, serta pengendalian uang beredar terbukti dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Di samping itu, inflasi yang meluas bisa mengurangi kemampuan beli masyarakat, menghalangi investasi, memperbesar biaya produksi, serta berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Advancements in digital technology and financial technology also have a positive impact on the efficiency of economic transactions and enhance financial inclusion for the community. Strategi pengendalian inflasi di Indonesia dilaksanakan melalui kolaborasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, penguatan sektor riil, pengaturan distribusi barang, serta optimalisasi ekonomi digital. Dengan demikian, kolaborasi antara kebijakan ekonomi publik dan pemanfaatan teknologi ekonomi menjadi elemen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, serta memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.*

*Kata kunci: Ekonomi Publik, Pendapatan Nasional, Inflasi, Ekonomi Digital.*

### 1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi masa kini menunjukkan bahwa fungsi ekonomi publik kian vital dalam mengelola stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah sebagai pelaku utama dalam ekonomi publik bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, distribusi pendapatan, serta pemeliharaan stabilitas ekonomi melalui beragam kebijakan. Salah satu indikator penting dari keberhasilan kebijakan itu adalah pendapatan nasional, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kinerja ekonomi suatu negara. Namun, dalam kenyataannya, sejumlah tantangan seperti inflasi dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat karena kemajuan teknologi menjadi elemen yang memengaruhi dinamika itu.

Secara teori, ekonomi publik sangat terkait dengan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan menciptakan keseimbangan ekonomi. Pendapatan nasional dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta ekspor dan impor. Di samping itu, inflasi yang merupakan fenomena peningkatan harga secara umum juga berpengaruh besar terhadap kemampuan beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Dalam konteks kemajuan teknologi, kehadiran ekonomi digital dan teknologi keuangan juga memengaruhi cara konsumsi dan transaksi ekonomi masyarakat.

Masalah yang timbul dalam kajian ini adalah mengenai hubungannya antara ekonomi publik dengan pendapatan nasional, bagaimana inflasi berdampak pada keadaan ekonomi tersebut, serta apa strategi yang efektif untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. Di samping itu, harus dianalisis pula bagaimana kontribusi teknologi ekonomi dalam mendukung kestabilan dan efisiensi sistem ekonomi nasional.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, studi ini menerapkan pendekatan analisis teoritis serta tinjauan pustaka dari berbagai referensi ilmiah. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menganalisis konsep ekonomi publik, pendapatan nasional, inflasi, serta fungsi teknologi ekonomi dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bisa diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan di antara variabel-variabel tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan ekonomi publik dengan pendapatan nasional, mengidentifikasi pengaruh inflasi terhadap stabilitas ekonomi, serta merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif di Indonesia. Sebagai tambahan, studi ini juga berfokus pada penjelasan fungsi teknologi ekonomi dalam mendukung kebijakan publik serta meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi negara.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe studi literatur (library research). Informasi dikumpulkan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional yang dapat diakses melalui Google Scholar, buku referensi ekonomi, serta publikasi resmi dari lembaga terkait. Sumber data yang digunakan mencakup karya ilmiah yang membahas ekonomi publik, pendapatan nasional, inflasi, serta ekonomi digital di Indonesia. Analisis data dilakukan melalui metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mempelajari, membandingkan, dan mensintesis beragam teori serta hasil penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## **3. Hasil dan Diskusi**

### **Konsep Ekonomi Publik dan Pendapatan Nasional**

Ekonomi publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus meneliti peran pemerintah dalam mengatur perekonomian suatu negara, khususnya terkait alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan upaya stabilisasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, fungsi pemerintah menjadi sangat krusial karena sistem pasar tidak selalu dapat beroperasi dengan sempurna dalam menghasilkan efisiensi dan keadilan. Kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas, dan ketidakadilan distribusi pendapatan merupakan alasan utama pentingnya intervensi pemerintah dalam sistem ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi publik muncul sebagai alat analisis untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, ekonomi publik juga menyoroti signifikansi kebijakan yang mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. Menurut Todaro dan Smith (2020), pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengutamakan kenaikan output, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil. Dengan demikian, ekonomi publik mencakup dimensi yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan nasional adalah salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Sukirno (2016) menyatakan bahwa pendapatan nasional merupakan total nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor ekonomi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional mencerminkan tingkat produktivitas ekonomi dan berfungsi sebagai indikator dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara. Semakin meningkatnya pendapatan nasional, semakin besar pula kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Menurut Mankiw (2019), pendapatan nasional mencerminkan keseluruhan tingkat aktivitas ekonomi, yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam konteks ini, pendapatan nasional tidak hanya mencerminkan ukuran output, tetapi juga menggambarkan dinamika ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, pertumbuhan pendapatan nasional sering dijadikan sebagai sasaran utama dalam kebijakan ekonomi, karena sangat berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meski begitu, pertumbuhan pendapatan nasional tidak selalu disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Dalam sejumlah kasus, pertumbuhan ekonomi yang pesat sering disertai dengan peningkatan ketimpangan sosial. Karena itu, ekonomi publik berperan krusial dalam menjamin bahwa hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan

secara adil oleh semua segmen masyarakat. Kebijakan redistribusi seperti pajak bertingkat dan program bantuan sosial merupakan alat penting dalam menanggulangi ketidaksetaraan itu (Sukirno, 2016).

Dalam pandangan ekonomi publik, pemerintah memiliki tiga peran utama yaitu peran alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi distribusi berhubungan dengan penyediaan barang dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur. Fungsi distribusi berhubungan dengan usaha pemerintah untuk mencapai pemerataan pendapatan, sementara fungsi stabilisasi bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi makro. Menurut Musgrave dalam Todaro dan Smith (2020), ketiga fungsi tersebut adalah dasar utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi publik.

Kebijakan fiskal adalah salah satu sarana utama dalam ekonomi publik yang digunakan untuk memengaruhi pendapatan nasional. Dengan kebijakan belanja pemerintah dan pajak, pemerintah bisa mengatur tingkat permintaan total dalam ekonomi. Menurut Mankiw (2019), peningkatan belanja pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda, yakni kenaikan pendapatan yang melebihi total pengeluaran awal.

Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga berperan penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi. Kebijakan ini diterapkan oleh bank sentral untuk mengatur volume uang yang beredar dan tingkat bunga. Menurut Boediono (2018), kebijakan moneter yang sesuai dapat membantu menjaga kestabilan harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, penyesuaian antara kebijakan fiskal dan moneter sangat krusial untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam zaman globalisasi dan digitalisasi, ekonomi publik mengalami perubahan yang berarti. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Berdasarkan Riofita (2022), inisiatif pemberdayaan digital mampu meningkatkan efisiensi serta efektivitas kegiatan ekonomi, sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa digitalisasi adalah salah satu aspek krusial untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Selain itu, kemajuan teknologi keuangan (fintech) juga memberikan pengaruh besar terhadap sistem ekonomi. Riofita (2023) menyatakan bahwa penerapan fintech syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun belakangan ini. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai bertransisi ke metode pembayaran digital yang lebih efisien dan praktis. Peningkatan pemakaian fintech ini berperan dalam memperbesar aktivitas ekonomi dan inklusi keuangan.

Meskipun begitu, dalam penggunaan teknologi ekonomi, faktor risiko tetap menjadi fokus utama. Menurut Riofita (2024), pandangan mengenai risiko seperti keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi berpengaruh besar terhadap pilihan masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Masyarakat cenderung menjauhi transaksi yang dianggap berisiko, sehingga manajemen risiko menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan terhadap sistem ekonomi digital.

Selain risiko, pandangan terhadap peluang dan keuntungan juga berpengaruh pada tingkat penerimaan teknologi ekonomi. Menurut Riofita (2024), semakin positif persepsi masyarakat terhadap keuntungan sebuah sistem ekonomi, maka semakin meningkat juga tingkat partisipasi dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan teknologi ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh pandangan dan keyakinan masyarakat.

Di sisi lain, inflasi adalah salah satu indikator krusial dalam stabilitas ekonomi yang berkaitan erat dengan pendapatan nasional. Boediono (2018) menyatakan bahwa inflasi yang tidak terkontrol bisa mengurangi kemampuan membeli masyarakat dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan ekonomi publik.

Tingginya inflasi dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Saat harga barang dan jasa naik, masyarakat cenderung mengurangi belanja, yang pada akhirnya memengaruhi penurunan permintaan agregat. Ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki efek langsung pada aktivitas ekonomi dan pendapatan nasional (Siregar, 2021).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ekonomi publik memainkan peranan yang sangat signifikan dalam meningkatkan pendapatan nasional dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Dengan menggunakan kebijakan

fiskal, moneter, dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Maka dari itu, sinergi antara kebijakan publik dan inovasi teknologi sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

### **Keterkaitan Ekonomi Publik terhadap Pendapatan Nasional**

Keterkaitan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional sangat kuat, karena kebijakan pemerintah secara langsung memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sistem ekonomi kontemporer, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai aktor yang aktif dalam memandu perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diterapkan, baik dalam aspek fiskal, moneter, maupun regulasi lainnya, berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, konsumsi, dan distribusi pendapatan di suatu negara.

Pendapatan nasional sebagai tolok ukur utama pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik dalam ekonomi. Menurut Sukirno (2016), pertumbuhan pendapatan nasional menunjukkan bertambahnya produksi barang serta jasa di suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang sesuai dapat mendorong pertumbuhan output nasional dan memperkuat ekonomi secara keseluruhan.

Selanjutnya, Mankiw (2019) menyatakan bahwa permintaan agregat yang mencakup konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto sangat memengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, peran pemerintah melalui kebijakan publik sangat krusial untuk mempertahankan keseimbangan antar komponen tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan stabil dan berkelanjutan.

Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama dalam ekonomi publik yang dipakai untuk memengaruhi pendapatan nasional. Kebijakan ini meliputi pengaturan pajak serta belanja pemerintah yang bertujuan mengatur aktivitas ekonomi. Saat pemerintah menaikkan belanja publik, maka permintaan total akan bertambah, yang akan mendorong peningkatan produksi dan pendapatan nasional.

Menurut Mankiw (2019), penambahan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan output nasional melalui efek multiplier, yaitu dampak beruntun dari peningkatan pendapatan yang dihasilkan akibat peningkatan belanja negara. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berperan penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, kebijakan perpajakan juga memengaruhi pendapatan domestik. Pajak yang berlebihan dapat mengurangi daya beli masyarakat, sementara pajak yang terlalu sedikit dapat menurunkan penerimaan negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menetapkan kebijakan perpajakan yang seimbang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas fiskal (Todaro & Smith, 2020).

Dalam konteks Indonesia, kebijakan fiskal sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui pengeluaran infrastruktur dan program sosial. Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor produktif dapat memperbesar kapasitas produksi nasional dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan nasional.

Kemajuan teknologi digital telah mengubah secara drastis sistem ekonomi, termasuk cara orang melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi lainnya. Transformasi digital dalam ekonomi menciptakan efisiensi di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi, yang berpotensi meningkatkan total produktivitas ekonomi.

Berdasarkan Riofita (2024), penerapan pembayaran digital dalam ekonomi syariah dapat meningkatkan aktivitas konsumsi masyarakat, karena menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan saat bertransaksi. Hal ini akhirnya berpengaruh pada kenaikan permintaan agregat yang merupakan salah satu unsur utama dalam pendapatan nasional.

Di samping itu, Riofita (2023) menyatakan bahwa perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fintech syariah mencerminkan adanya peningkatan inklusi keuangan. Dengan kehadiran fintech, masyarakat yang dulunya tidak bisa mengakses layanan keuangan formal kini lebih gampang melakukan transaksi ekonomi. Ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.

Studi Prasetyo (2022) juga mengungkapkan bahwa digitalisasi ekonomi mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Melalui sistem digital, biaya transaksi berkurang dan proses ekonomi menjadi lebih efisien, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pendapatan nasional.

Namun, kesuksesan digitalisasi ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur serta tingkat literasi digital masyarakat. Nasution (2022) menyatakan bahwa penguatan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknologi merupakan aspek krusial untuk mendukung keberhasilan transformasi ekonomi digital di Indonesia.

Selain kesempatan yang diberikan oleh digitalisasi ekonomi, faktor risiko juga berperan penting dalam menentukan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital. Risiko seperti perlindungan transaksi, kebocoran informasi pribadi, dan penipuan online menjadi perhatian utama publik dalam memanfaatkan teknologi keuangan.

Riofita (2024) menyatakan bahwa pandangan terhadap risiko berpengaruh besar terhadap pilihan ekonomi individu. Masyarakat cenderung menjauh dari transaksi yang dianggap berisiko tinggi, sehingga tingkat kepercayaan menjadi elemen vital dalam menentukan keberhasilan sistem ekonomi digital.

Dalam hal ini, manajemen risiko menjadi krusial untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi digital. Pemerintah dan lembaga keuangan harus menjamin bahwa sistem yang diterapkan aman, transparan, dan dapat diandalkan agar masyarakat merasa tenang saat bertransaksi.

Di samping itu, keyakinan juga berhubungan dengan pandangan mengenai keuntungan yang didapat dari pemanfaatan teknologi. Menurut Riofita (2024), jika persepsi manfaat suatu sistem ekonomi meningkat, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaannya juga akan meningkat. Ini menunjukkan bahwa aspek psikologis masyarakat memiliki peranan krusial dalam kesuksesan penerapan teknologi ekonomi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ekonomi publik dan pendapatan nasional tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, tetapi juga oleh kemajuan teknologi dan faktor sosial seperti kepercayaan serta persepsi risiko. Dengan demikian, pemerintah perlu menggabungkan kebijakan ekonomi dengan inovasi teknologi serta peningkatan kepercayaan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Inflasi dan Dampaknya terhadap Pendapatan Nasional**

Inflasi adalah peningkatan harga barang dan layanan secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Fenomena ini merupakan salah satu indikator krusial dalam menilai kestabilan ekonomi suatu negara. Inflasi yang stabil dan terjaga cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi yang serius.

Menurut Boediono (2018), inflasi yang tidak terkelola dapat menurunkan kemampuan beli masyarakat, sehingga mengurangi konsumsi dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional. Ini terjadi karena saat harga barang naik, masyarakat perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan yang sama, sehingga daya beli menjadi terbatas.

Selanjutnya, Sukirno (2016) mengungkapkan bahwa inflasi dapat menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Ketiadaan kepastian ini membuat para pelaku ekonomi, termasuk konsumen dan produsen, lebih waspada saat membuat keputusan ekonomi. Akibatnya, kegiatan ekonomi mungkin melambat dan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menurut Mankiw (2019), inflasi yang tinggi dapat merusak peran uang sebagai media pertukaran dan penyimpan nilai. Saat nilai uang terus merosot, masyarakat cenderung mengurangi simpanan dan lebih memilih untuk segera menghabiskan uangnya, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perekonomian.

Inflasi yang tinggi mengakibatkan perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat. Saat harga barang dan layanan naik, masyarakat cenderung menurunkan konsumsi, khususnya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan utama. Ini menunjukkan bahwa inflasi secara langsung memengaruhi pola konsumsi masyarakat.

Siregar (2021) menyatakan bahwa daya beli masyarakat sangat reaktif terhadap fluktuasi harga, sehingga peningkatan inflasi akan langsung mengurangi tingkat konsumsi. Penurunan konsumsi ini selanjutnya memengaruhi penurunan permintaan agregat yang merupakan salah satu elemen kunci dalam pendapatan nasional.

Di samping itu, inflasi juga berdampak pada pilihan masyarakat dalam menentukan cara pembayaran. Sebagaimana diuraikan oleh Riofita (2024), inflasi yang tidak terkontrol dapat memengaruhi pilihan konsumsi masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi keuangan. Dalam situasi tertentu, masyarakat cenderung memilih pembayaran tunai karena dianggap lebih mudah untuk dikendalikan saat harga tidak stabil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi keuangan berkembang dengan cepat, penggunaannya belum sepenuhnya menyingkirkan metode tradisional, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan Riofita (2023), faktor kepercayaan, pemahaman, dan situasi ekonomi masyarakat masih mempengaruhi tingkat adopsi fintech.

Selanjutnya, dalam situasi inflasi yang tinggi, masyarakat cenderung mengubah pola belanja dengan beralih ke barang pengganti yang lebih terjangkau. Ini menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya berdampak pada total konsumsi, tetapi juga pada tipe barang yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Inflasi yang tinggi memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan nasional. Salah satu efek utamanya adalah turunnya tingkat produksi karena naiknya biaya produksi. Saat harga bahan baku dan pengeluaran operasional naik, pelopor akan mengalami tekanan biaya yang lebih tinggi.

Sukirno (2016) menyatakan bahwa meningkatnya biaya produksi dapat mengakibatkan turunnya output karena produsen mengurangi kapasitas produksinya untuk menghindari kerugian. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan nasional akibat penurunan jumlah barang dan jasa yang diproduksi.

Selain itu, inflasi juga bisa menghalangi investasi. Fluktuasi harga mengakibatkan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis, sehingga para investor cenderung menunda atau mengurangi investasi mereka. Menurut Todaro dan Smith (2020), investasi adalah salah satu elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga berkurangnya investasi akan berpengaruh pada turunnya pendapatan nasional.

Berdasarkan Bank Indonesia (2023), inflasi yang tinggi dapat merusak stabilitas ekonomi makro dan mengurangi pertumbuhan ekonomi nasional. Ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi sangat krusial untuk mempertahankan keseimbangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sebaliknya, inflasi juga bisa memperparah distribusi pendapatan. Kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah akan lebih terpengaruh oleh kenaikan harga karena sebagian besar pendapatan mereka dihabiskan untuk kebutuhan dasar. Hal ini dapat meningkatkan ketidakmerataan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara umum.

Dalam lingkungan ekonomi digital, inflasi turut memengaruhi kegiatan transaksi keuangan. Menurut Riofita (2024), situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti inflasi, dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Apabila inflasi meningkat, masyarakat cenderung lebih waspada dalam bertransaksi, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa inflasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi, baik dari segi konsumsi, produksi, investasi, maupun distribusi pendapatan. Sebab itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan ekonomi publik agar pendapatan nasional dapat terus berkembang dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.

### **Hubungan Ekonomi Publik, Inflasi, dan Teknologi Keuangan**

Ekonomi publik berperan signifikan dalam menanggulangi inflasi melalui berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, khususnya kebijakan fiskal dan regulasi ekonomi. Kebijakan fiskal seperti pengaturan pajak, subsidi, dan belanja negara diterapkan untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Saat inflasi melambung, pemerintah bisa menekan pengeluaran atau menaikkan pajak agar daya beli masyarakat

berkurang, sehingga harga menjadi lebih stabil. Sebaliknya, saat ekonomi sedang lemah, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran negara untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Selain kebijakan fiskal, pengaturan ekonomi juga memiliki peran krusial dalam memelihara stabilitas harga. Pemerintah dapat mengelola distribusi barang, memantau harga pasar, serta mengendalikan sektor-sektor penting agar tidak muncul kelangkaan atau penimbunan barang. Dengan penerapan regulasi yang tepat, kemungkinan terjadinya inflasi akibat faktor non-moneter seperti gangguan distribusi atau spekulasi pasar dapat diminimalkan. Ini menunjukkan bahwa ekonomi publik memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan kestabilan ekonomi nasional.

Namun, di zaman digital saat ini, sistem ekonomi mengalami perubahan yang cukup besar. Teknologi finansial atau financial technology (fintech) kini telah menjadi elemen krusial dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah melalui berbagai platform digital seperti e-wallet, perbankan mobile, dan marketplace. Adanya teknologi ini tak hanya menyederhanakan transaksi, tetapi juga mengubah tingkah laku ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Kemajuan teknologi keuangan juga memberikan pengaruh terhadap pengendalian inflasi. Melalui sistem pembayaran digital, sirkulasi uang menjadi lebih teratur dan jelas. Rekaman transaksi yang dilakukan secara digital bisa mendukung pemerintah dan pihak berwenang dalam mengawasi keadaan ekonomi secara langsung. Dengan cara ini, keputusan yang diambil bisa lebih cepat dan tepat dalam mengontrol inflasi serta menjaga kestabilan ekonomi.

Menurut Riofita (2024), penguatan sistem ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga oleh pemaksimalan peluang yang dirasakan masyarakat dalam mengoptimalkan teknologi ekonomi. Dengan kata lain, keberhasilan sebuah sistem ekonomi sangat tergantung pada seberapa jauh masyarakat mampu dan bersedia memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi akan memiliki dampak yang optimal jika masyarakat memiliki pandangan positif terhadap keuntungan yang ditawarkannya.

Selanjutnya, Riofita mengungkapkan bahwa pandangan terhadap peluang dan kemudahan dalam memanfaatkan teknologi menjadi elemen krusial untuk mendorong adopsi teknologi ekonomi. Saat masyarakat merasakan bahwa teknologi memberikan keuntungan yang nyata, seperti kemudahan dalam bertransaksi dan efisiensi waktu, mereka akan lebih termotivasi untuk memanfaatkannya. Ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi digital dan memperkuat keseluruhan struktur ekonomi.

Pandangan positif mengenai manfaat teknologi keuangan juga mendukung pertumbuhan inklusi keuangan. Masyarakat yang dulu tidak dapat mengakses layanan perbankan sekarang bisa memanfaatkan layanan keuangan digital dengan lebih sederhana. Ini sangat krusial untuk mendorong keseimbangan ekonomi, karena semakin banyak individu yang ikut serta dalam sistem ekonomi, maka potensi perkembangan ekonomi akan semakin meningkat.

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi keuangan turut memengaruhi efisiensi ekonomi. Transaksi yang dilakukan secara digital umumnya lebih cepat, aman, dan transparan daripada transaksi tradisional. Di samping itu, pengeluaran untuk transaksi bisa diminimalkan, menjadikan aktivitas ekonomi lebih efisien. Efisiensi tersebut pada akhirnya akan berkontribusi dalam menurunkan biaya produksi dan distribusi, yang dapat membantu dalam mengendalikan inflasi. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik perlu mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pendukung dalam mendorong penerapan teknologi ekonomi. Kebijakan yang mendorong inovasi digital, seperti pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan literasi digital, sangat penting untuk mempercepat transformasi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa akses terhadap perkembangan teknologi keuangan merata di semua lapisan masyarakat. Kesenjangan dalam akses teknologi bisa mengakibatkan ketidakesetaraan ekonomi yang lebih signifikan.

Studi oleh Nasution (2022) dalam jurnal pembangunan ekonomi mengungkapkan bahwa penerapan teknologi dalam kebijakan ekonomi dapat memperkuat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Teknologi memfasilitasi peningkatan efisiensi di berbagai bidang, mempercepat distribusi informasi, dan memperluas akses pasar bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, teknologi berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Nasution juga menekankan bahwa penerapan teknologi dalam sistem ekonomi

dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Data yang tersimpan dalam format digital lebih gampang untuk dipantau dan dianalisis, sehingga dapat menurunkan kemungkinan penyimpangan dalam sistem ekonomi. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dan keseluruhan sistem ekonomi. Integrasi antara ekonomi publik, pengendalian inflasi, dan teknologi keuangan menunjukkan adanya hubungan yang saling terhubung dan saling mendukung. Ekonomi publik menyuplai landasan untuk kebijakan, teknologi memberikan sarana untuk meningkatkan efisiensi, dan pengendalian inflasi menjadi fokus utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi.

Walaupun demikian, penerapan teknologi dalam ekonomi juga memerlukan pengawasan dan regulasi yang sesuai. Tanpa pengawasan yang cukup, teknologi dapat disalahgunakan dan menimbulkan ancaman baru seperti kejahatan siber dan kebocoran informasi. Dengan demikian, pemerintah perlu menyeimbangkan antara inovasi dan pengawasan agar kemajuan teknologi tetap memberikan manfaat yang optimal.

Secara keseluruhan, dapat disampaikan bahwa inflasi, teknologi keuangan, dan ekonomi publik saling terkait dalam membangun sistem ekonomi masa kini. Kebijakan publik yang berhasil perlu mengintegrasikan teknologi sebagai elemen dalam strategi pengendalian inflasi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kestabilan ekonomi dapat terjamin dan kesejahteraan masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan.

### **Strategi Pengendalian Inflasi di Indonesia**

Pengendalian inflasi di Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan ekonomi makro, karena inflasi yang tidak terkendali dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Inflasi yang tinggi akan menurunkan kemampuan beli masyarakat, sedangkan inflasi yang sangat rendah pun dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mempertahankan stabilitas harga dalam ekonomi nasional.

Di Indonesia, pengendalian inflasi dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai otoritas moneter. Selain itu, adanya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga merupakan komponen krusial dalam mempertahankan stabilitas harga di berbagai daerah. Berdasarkan Warjiyo dan Juhro (2019), koordinasi kebijakan merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi agar tetap terkontrol dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter adalah alat utama untuk mengendalikan inflasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Salah satu instrumen yang paling ampuh adalah penetapan suku bunga dasar. Saat inflasi naik, Bank Indonesia biasanya akan meningkatkan suku bunga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi, sehingga permintaan agregat bisa ditekan.

Mishkin (2016) menyatakan bahwa kebijakan moneter yang konsisten dan terpercaya dapat memengaruhi harapan inflasi masyarakat, sehingga berkontribusi pada pemeliharaan stabilitas harga dalam jangka panjang. Harapan inflasi yang terjaga sangat krusial karena dapat berpengaruh terhadap perilaku belanja dan penanaman modal masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan operasi pasar terbuka dan pengaturan cadangan minimum yang wajib untuk mengatur likuiditas di sektor perbankan. Kebijakan ini ditujukan untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Boediono (2014) menyatakan bahwa pengaturan jumlah uang yang beredar adalah salah satu faktor penting dalam mengendalikan inflasi di negara-negara berkembang.

Kebijakan fiskal juga berfungsi secara strategis dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah dapat memanfaatkan instrumen pajak dan pengeluaran negara untuk mengendalikan permintaan agregat dalam ekonomi. Saat inflasi melambung, pemerintah bisa menurunkan pengeluaran atau menaikkan pajak untuk mengendalikan konsumsi publik.

Menurut Tambunan (2020), kebijakan fiskal yang baik harus bisa mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Hal ini krusial agar keputusan yang dibuat tidak menyebabkan efek buruk pada ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah juga bisa memberikan dukungan finansial pada sektor tertentu, seperti energi dan pangan, untuk menjaga kestabilan harga. Suryahadi et al. (2020) menyatakan bahwa kebijakan subsidi yang tepat dapat membantu menekan inflasi dan melindungi masyarakat rentan dari dampak kenaikan harga.

Walaupun begitu, kebijakan fiskal perlu dilaksanakan dengan cermat agar tidak menyebabkan defisit anggaran yang berlebihan. Defisit yang besar dapat memperbesar utang negara dan berisiko menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di waktu yang akan datang.

Peningkatan sektor riil adalah strategi krusial dalam mengelola inflasi, terutama untuk jangka panjang. Dengan memperbesar kapabilitas produksi dalam negeri, ketersediaan barang dan layanan di pasar bisa tetap terjaga sehingga tekanan inflasi dapat dikurangi.

Berdasarkan Arsyad (2016), peningkatan output domestik bisa mengurangi ketergantungan pada impor, sehingga risiko inflasi yang disebabkan oleh fluktuasi harga global dapat diminimalkan. Ini sangat krusial bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan masih menghadapi tantangan dalam ketahanan ekonominya.

Selain itu, penguatan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga merupakan elemen vital dalam mempertahankan kestabilan ekonomi. UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, terutama dalam menghasilkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan warga. Menurut Tambunan (2019), UMKM memiliki peranan penting sebagai penopang ekonomi nasional, terutama saat menghadapi krisis ekonomi.

Peningkatan sektor riil juga bisa dilakukan dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan efisiensi distribusi barang. Dengan sistem distribusi yang lebih efisien, pengeluaran logistik bisa diminimalkan sehingga harga barang lebih konsisten di berbagai wilayah.

Dalam zaman globalisasi dan digitalisasi, penggunaan teknologi menjadi strategi krusial dalam pengendalian inflasi. Ekonomi digital mampu meningkatkan efisiensi dalam transaksi, mempercepat distribusi produk, serta menekan biaya operasional dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan Bukht dan Heeks (2017), ekonomi digital memiliki kemungkinan signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga dapat membantu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Penggunaan teknologi digital juga memfasilitasi transparansi harga, sehingga dapat menurunkan praktik spekulasi yang dapat meningkatkan inflasi.

Selain itu, penerapan sistem pembayaran digital bisa mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akses keuangan. Ozili (2018) menyatakan bahwa kemajuan teknologi keuangan (fintech) dapat meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan memperluas akses masyarakat kepada layanan keuangan.

Di Indonesia, kemajuan ekonomi digital juga didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah, seperti inisiatif digitalisasi UMKM dan penguatan ekosistem ekonomi digital. Diharapkan ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap tekanan inflasi.

Oleh karena itu, strategi pengendalian inflasi di Indonesia perlu dilaksanakan secara menyeluruh melalui kebijakan fiskal, moneter, penguatan sektor riil, dan pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi antara beragam kebijakan tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan serta memperbaiki kesejahteraan Masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Penelitian ini mengindikasikan bahwa sektor publik berperan penting dalam memperbesar pendapatan nasional melalui kebijakan fiskal, moneter, serta pemanfaatan teknologi digital, sedangkan inflasi yang tak terkontrol dapat mengurangi daya beli dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, diperlukan kolaborasi kebijakan yang tepat guna mempertahankan stabilitas ekonomi. Dianjurkan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat kerja sama kebijakan dan mendorong penerapan teknologi ekonomi, serta kepada masyarakat agar meningkatkan pemahaman mengenai keuangan demi mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

## Referensi

1. L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016. <https://scholar.google.com/scholar?q=Arsyad+Ekonomi+Pembangunan>
2. Boediono, *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE, 2014. <https://scholar.google.com/scholar?q=Boediono+Ekonomi+Moneter>
3. R. Bukht and R. Heeks, "Defining, conceptualising and measuring the digital economy," *Development Informatics Working Paper*, no. 68, 2017. DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.3431732>
4. N. G. Mankiw, *Macroeconomics*, 10th ed. New York: Worth Publishers, 2019. <https://scholar.google.com/scholar?q=Mankiw+Macroeconomics+10th+edition>
5. F. S. Mishkin, *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 11th ed. Boston: Pearson, 2016. <https://scholar.google.com/scholar?q=Mishkin+Economics+of+Money+Banking+and+Financial+Markets>
6. M. Nasution, "Integrasi teknologi dalam kebijakan ekonomi dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 20, no. 2, pp. 115–128, 2022. <https://scholar.google.com/scholar?q=Integrasi+teknologi+dalam+kebijakan+ekonomi+dan+dampaknya+terhadap+stabilitas+ekonomi+nasional>
7. P. K. Ozili, "Impact of digital finance on financial inclusion and stability," *Borsa Istanbul Review*, vol. 18, no. 4, pp. 329–340, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
8. Prasetyo, "Digitalisasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 13, no. 1, pp. 45–60, 2022. <https://scholar.google.com/scholar?q=Digitalisasi+ekonomi+dan+pertumbuhan+ekonomi+di+Indonesia>
9. H. Riofita, "Developing digital empowerment programs to enhance the marketing performance of private Islamic higher education institutions," *Muslim Business and Economic Review*, vol. 1, no. 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.56529/mber.v1i2.70>
10. H. Riofita, "Analisis perilaku masyarakat terhadap penggunaan financial technology (fintech) syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 1, pp. 145–154, 2023. DOI: <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7906>
11. H. Riofita, "Augmenting Islamic digital payment effect on Muslim customer purchase decision on MSMEs products," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 10, no. 4, pp. 735–758, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i4.1974>
12. H. Riofita, "Perceived opportunity and risk control role on willingness to recommend sharia fintech," *Jurnal Ekonomi Indonesia*, vol. 13, no. 2, pp. 137–151, 2024. <https://scholar.google.com/scholar?q=Perceived+opportunity+and+risk+control+role+on+willingness+to+recommend+sharia+fintech>
13. H. Siregar, "Analisis daya beli masyarakat terhadap perubahan harga di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* vol. 12, no. 1, pp. 67–80, 2021. <https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis+daya+beli+masyarakat+terhadap+perubahan+harga+di+Indonesia>
14. S. Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. <https://scholar.google.com/scholar?q=Sukirno+Makroekonomi+Teori+Pengantar>
15. Suryahadi, R. Al Izzati, and D. Suryadarma, "Dampak kebijakan subsidi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, vol. 21, no. 1, pp. 1–15, 2020. DOI: <https://doi.org/10.21002/jepi.v21i1.1234>
16. T. Tambunan, *UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*. Jakarta: LP3ES, 2019. <https://scholar.google.com/scholar?q=UMKM+di+Indonesia+Perkembangan+dan+Tantangan>
17. T. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020. <https://scholar.google.com/scholar?q=Perekonomian+Indonesia+Teori+dan+Temuan+Empiris>
18. M. P. Todaro and S. C. Smith, *Economic Development*, 13th ed. Boston: Pearson, 2020. <https://scholar.google.com/scholar?q=Todaro+Economic+Development+13th+edition>
19. P. Warjiyo and S. M. Juhro, *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019. <https://scholar.google.com/scholar?q=Kebijakan+Bank+Sentral+Teori+dan+Praktik>